



Pandangan Mahasiswa Dan Masyarakat Tentang Dampak Korupsi Di Kehidupan Sosial

Axel Roland, Willi Zega , Nadel Robin Yan Rolos

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Bandar Lampung

Jl. Z.A Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar
Lampung

E-mail: robinrolos123@gmail.com , willizega74@gmail.com
& AxelRoland213@gmail.com

***Abstract** Corruption is a major issue that affects not only the economic sector but also the social life of society. This article aims to analyze the perspectives of students and the general public regarding the impact of corruption on social life. The study employs a qualitative approach using interviews and literature review as data collection methods. The findings indicate that students perceive corruption as a threat to moral values, social justice, and public trust in institutions, while the general public experiences more direct impacts such as increasing social inequality, declining quality of public services, and reduced welfare. Both groups agree that corruption damages social structures and hinders development. Therefore, preventive efforts are needed through anti-corruption education, increased legal awareness, and strengthening integrity values across all levels of society.*

***Keywords:** Corruption, Social Impact, Students, Society, Social Inequality, Public Trust, Anti-Corruption Education*

Abstrak Korupsi merupakan permasalahan yang berdampak luas tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga kehidupan sosial masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mahasiswa dan masyarakat mengenai dampak korupsi dalam kehidupan sosial. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahasiswa memandang korupsi sebagai ancaman terhadap nilai moral, keadilan sosial, dan kepercayaan publik terhadap lembaga, sedangkan masyarakat lebih merasakan dampak langsung berupa meningkatnya ketimpangan sosial, menurunnya kualitas layanan publik, serta berkurangnya kesejahteraan. Kedua kelompok sepakat bahwa korupsi merusak tatanan sosial dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan melalui pendidikan anti korupsi, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan nilai integritas di berbagai lapisan masyarakat.

Kata kunci: Korupsi, Dampak Sosial, Mahasiswa, Masyarakat, Ketimpangan Sosial, Kepercayaan Publik, Pendidikan Anti Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang terus menjadi tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik ini tidak hanya merugikan negara dari segi finansial melalui penyalahgunaan anggaran dan sumber daya, tetapi juga menimbulkan dampak yang luas dan kompleks terhadap kehidupan sosial masyarakat¹. Secara sosial, korupsi dapat memperparah ketimpangan karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum justru disalahgunakan oleh pihak tertentu. Akibatnya, distribusi pembangunan menjadi tidak merata dan kelompok

¹ Putri, A. A., Jania, C., & Andrian, S. D. (2024). *Dampak korupsi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial*. Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, 2(2).

masyarakat yang kurang mampu semakin tertinggal. Selain itu, korupsi juga menurunkan kualitas pelayanan publik, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, karena anggaran yang tersedia tidak digunakan secara optimal.

Lebih jauh lagi, praktik korupsi dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum. Ketika masyarakat merasa bahwa sistem tidak berjalan secara adil dan transparan, hal ini dapat memicu sikap apatis, ketidakpatuhan terhadap aturan, serta menurunnya partisipasi dalam kehidupan demokrasi². Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat pembangunan nasional dan merusak tatanan sosial.

Dalam kehidupan sosial, korupsi memiliki potensi besar dalam merusak nilai-nilai moral yang menjadi dasar interaksi masyarakat, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Ketika praktik korupsi terjadi secara terus-menerus dan tidak ditindak secara tegas, hal ini dapat menciptakan normalisasi terhadap perilaku menyimpang. Masyarakat menjadi terbiasa melihat ketidakjujuran sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dalam beberapa kasus dianggap sebagai cara yang dapat diterima untuk mencapai tujuan tertentu.³ Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan tumbuh budaya permisif terhadap tindakan tidak jujur yang pada akhirnya melemahkan tatanan sosial dan etika kolektif.

Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kesadaran serta menanamkan budaya antikorupsi.⁴ Sebagai kelompok yang memiliki akses terhadap pendidikan dan informasi, mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan (*agent of change*) yang tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga aktif menyuarakan nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, masyarakat umum merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari praktik korupsi, baik dalam bentuk buruknya pelayanan publik, ketidakadilan sosial, hingga terbatasnya akses terhadap fasilitas dasar.

Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman hidup, serta tingkat pemahaman individu menyebabkan munculnya variasi pandangan antara mahasiswa dan masyarakat dalam menilai dampak korupsi. Mahasiswa, sebagai kelompok yang berada dalam lingkungan akademik, umumnya memiliki akses yang lebih luas terhadap teori, konsep,

² Stephen D. Morris & Joseph L. Klesner, "Corruption and Trust," *Comparative Political Studies* 43, no. 10 (2010): 1258–1285.

³ Raisyah, R., Ningrum, Z. A., & Adila, A. (2024). *Peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia*. *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.34>

⁴ Wibowo, A., & Puspitasari, D. (2021). Peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 112–120.

dan kajian ilmiah mengenai korupsi. Hal ini membuat mereka cenderung melihat korupsi dari sudut pandang konseptual, seperti pelanggaran terhadap prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, serta dampaknya terhadap sistem demokrasi dan pembangunan nasional.⁵ Selain itu, mahasiswa juga sering dipengaruhi oleh nilai-nilai idealisme, sehingga mereka memandang korupsi sebagai tindakan yang harus diberantas secara tegas demi terciptanya keadilan sosial.

Di sisi lain, masyarakat umum lebih banyak menilai korupsi berdasarkan pengalaman nyata yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Perspektif ini terbentuk dari interaksi langsung dengan berbagai layanan publik, seperti proses administrasi, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga pengurusan dokumen. Dalam konteks ini, korupsi sering dipahami sebagai praktik yang memperlambat pelayanan, meningkatkan biaya, serta menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap fasilitas publik. Bagi sebagian masyarakat, korupsi bahkan dapat dianggap sebagai sesuatu yang “lumrah” apabila telah terjadi secara berulang dan tidak mendapatkan penanganan yang serius.

Perbedaan cara pandang ini juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Mahasiswa yang relatif berada dalam lingkungan pendidikan mungkin belum sepenuhnya merasakan dampak langsung dari korupsi dalam aspek praktis, sedangkan masyarakat, khususnya dari kelompok ekonomi menengah ke bawah, lebih merasakan dampaknya secara langsung dan nyata. Akibatnya, masyarakat cenderung memiliki pandangan yang lebih pragmatis, sementara mahasiswa lebih normatif dan idealis.

Oleh karena itu, perbedaan perspektif antara mahasiswa dan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Dengan menggabungkan sudut pandang konseptual dari mahasiswa dan pengalaman empiris dari masyarakat, dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh mengenai bagaimana korupsi memengaruhi kehidupan sosial. Kajian ini tidak hanya memperkaya analisis, tetapi juga membantu dalam merumuskan solusi yang lebih relevan, realistis, dan tepat sasaran dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di berbagai lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode empiris, yaitu metode yang didasarkan pada pengamatan serta pengalaman langsung dari responden di lapangan. Metode ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh data yang nyata, faktual, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya mengenai pandangan mahasiswa dan masyarakat tentang dampak korupsi

⁵ Sari, N. P. (2020). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya pembentukan karakter mahasiswa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 5(1), 45–53.

dalam kehidupan sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang responden secara mendalam, khususnya terkait bagaimana mereka memaknai dan menilai dampak korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih luas dan tidak terbatas pada angka-angka saja, melainkan pada opini, pengalaman, dan pemahaman responden.⁶ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara.

Wawancara dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan responden yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum yang sesuai dengan kriteria penelitian. Pemilihan responden dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman atau pemahaman terhadap isu korupsi. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar pembahasan tetap terarah. Namun, wawancara juga bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat mengajukan pertanyaan tambahan sesuai dengan jawaban responden. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, jelas, dan terperinci mengenai pandangan responden tentang dampak korupsi, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun moral dalam kehidupan masyarakat.

Melalui wawancara secara langsung, peneliti tidak hanya memperoleh jawaban secara lisan, tetapi juga dapat memahami ekspresi, sikap, dan respons nonverbal dari responden. Hal ini membantu peneliti dalam menafsirkan jawaban secara lebih akurat dan menyeluruh. Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dikumpulkan, disusun, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan jawaban responden berdasarkan tema tertentu, seperti dampak sosial, tingkat kepercayaan masyarakat, dan perubahan perilaku sosial akibat korupsi. Dari hasil analisis tersebut, peneliti dapat mengetahui kecenderungan, persepsi, serta pola pemikiran mahasiswa dan masyarakat terkait dampak korupsi dalam kehidupan sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana korupsi mempengaruhi kehidupan sosial serta meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya mahasiswa, akan pentingnya sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶ A'yun, S. Q., Habsy, B. A., & Nursalim, M. (2025). *Model-model penelitian kualitatif: Literature review*. Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia, 4(2), 341–354.

Pandangan Mahasiswa dan Masyarakat terhadap Dampak Korupsi dalam Kehidupan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden menyatakan bahwa korupsi memberikan dampak negatif dalam kehidupan sosial. Jessica Ananta dan Wari Wijaya berpendapat bahwa korupsi menimbulkan ketidakadilan sosial karena hak masyarakat tidak terpenuhi secara merata. Budi Santoso dan Dedi Kurniawan menambahkan bahwa korupsi menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sementara itu, Rifqi Abdillah dan Farida menilai bahwa korupsi merusak moral generasi muda, dan M. Bagas Prasetyo bersama Julfikar menyatakan bahwa korupsi memperlebar kesenjangan sosial. Selain itu, Fari Fadillah Ramadhan dan Daniel Jordan Hutabarat berpendapat bahwa korupsi menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi tidak sejahtera.

Dampak korupsi yang dirasakan dalam kehidupan sosial cukup luas dan kompleks. Budi Santoso dan Julfikar menyampaikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin menurun akibat praktik korupsi. M. Bagas Prasetyo dan Dedi Kurniawan menyoroti meningkatnya kesenjangan sosial, di mana yang kaya semakin diuntungkan sementara masyarakat kecil semakin tertinggal. Farida dan Wari Wijaya mengungkapkan bahwa pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan menjadi tidak optimal. Selain itu, Rifqi Abdillah dan Fari Fadillah Ramadhan menyatakan bahwa nilai kejujuran dan moral masyarakat ikut menurun, bahkan korupsi dapat dianggap sebagai hal biasa. Jessica Ananta dan Daniel Jordan Hutabarat juga menambahkan bahwa korupsi berkontribusi terhadap meningkatnya kemiskinan karena penyalahgunaan dana publik.

Untuk mengurangi dampak korupsi, para responden mengusulkan berbagai upaya strategis. Sebagian besar responden sepakat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara tegas agar memberikan efek jera bagi pelaku. Fari Fadillah Ramadhan dan Rifqi Abdillah menekankan pentingnya pendidikan anti korupsi sejak dini guna menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Dedi Kurniawan dan M. Bagas Prasetyo menyarankan peningkatan pengawasan pemerintah melalui transparansi anggaran. Selain itu, Wari Wijaya dan Farida menilai bahwa masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan tindakan korupsi. Jessica Ananta dan Daniel Jordan Hutabarat juga menegaskan bahwa

mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan dalam mengedukasi masyarakat.

Berdasarkan perspektif mahasiswa dan masyarakat, terdapat beberapa faktor utama penyebab korupsi. Mayoritas responden menyebutkan bahwa rendahnya moral dan integritas menjadi penyebab utama. Budi Santoso dan Julfikar mengaitkan korupsi dengan tekanan ekonomi dan gaya hidup yang tinggi. M. Bagas Prasetyo dan Dedi Kurniawan menilai lemahnya penegakan hukum membuat pelaku tidak jera. Jessica Ananta dan Rifqi Abdillah menyatakan bahwa adanya kesempatan dan kekuasaan sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, Fari Fadillah Ramadhan dan Farida menyoroiti budaya permisif terhadap korupsi, seperti kebiasaan “uang pelicin” yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari.

B. Pembahasan

1. Dampak Korupsi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap mahasiswa dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok tersebut memiliki pandangan yang sejalan bahwa korupsi memberikan dampak yang sangat merugikan dalam kehidupan sosial. Dampak korupsi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi seperti kerugian negara, tetapi juga meluas ke berbagai aspek lain seperti menurunnya tingkat kepercayaan, rusaknya nilai moral, serta terganggunya hubungan sosial dalam masyarakat.

a. Dalam aspek kepercayaan,

Dalam aspek kepercayaan, korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara⁷. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden

⁷ Z. Hasan, “Implikasi Pengembalian Keuangan Negara terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan,” *Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, 2018.

menyatakan bahwa maraknya kasus korupsi membuat mereka merasa ragu terhadap integritas para pejabat dan aparat yang seharusnya menjalankan amanah untuk kepentingan publik. Masyarakat menilai bahwa pejabat yang diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya negara justru sering menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.⁸ Kondisi ini menimbulkan sikap skeptis di kalangan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Masyarakat cenderung mempertanyakan tujuan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, bahkan muncul anggapan bahwa kebijakan yang dibuat tidak sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat, melainkan mengandung kepentingan tertentu. Hal ini menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap pemerintah sebagai pengambil keputusan.

Lebih lanjut, rendahnya kepercayaan ini berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah. Sebagai contoh, masyarakat menjadi kurang antusias dalam mengikuti program pembangunan, kurang patuh terhadap aturan, bahkan enggan terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dalam beberapa kasus, masyarakat juga menunjukkan sikap apatis, yaitu tidak peduli terhadap kebijakan yang ada karena merasa bahwa suara atau peran mereka tidak memberikan pengaruh yang signifikan.⁹ Selain itu, menurunnya kepercayaan juga dapat memicu munculnya ketegangan sosial antara masyarakat dan pemerintah. Ketika masyarakat merasa tidak diperlakukan secara adil, maka dapat timbul rasa kekecewaan, ketidakpuasan, bahkan protes sosial. Hal ini tentu dapat mengganggu stabilitas sosial dan memperburuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

b. Terganggunya efektivitas pelaksanaan pembangunan.

⁸ Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

⁹ Setiawan, A. (2017). Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 45–58.

Dampak lainnya yang tidak kalah penting adalah terganggunya efektivitas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa responden menyatakan bahwa korupsi membuat program-program pembangunan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini terjadi karena adanya penyalahgunaan anggaran, pemotongan dana, atau bahkan proyek yang tidak dilaksanakan secara maksimal.

Pada dasarnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada perencanaan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi, mereka cenderung mendukung program pemerintah, baik melalui keterlibatan langsung maupun kepatuhan terhadap kebijakan yang ada.¹⁰ Namun, ketika kepercayaan tersebut menurun akibat maraknya kasus korupsi, maka dukungan masyarakat juga ikut menurun.

Rendahnya kepercayaan ini dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam pelaksanaan pembangunan.¹¹ Misalnya, dalam program bantuan sosial, masyarakat sering kali merasa ragu apakah bantuan tersebut benar-benar disalurkan secara adil atau tidak. Hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial dan konflik di lingkungan masyarakat. Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, atau fasilitas umum lainnya, masyarakat menjadi kurang percaya terhadap kualitas pembangunan karena adanya dugaan pengurangan anggaran akibat korupsi.

Tidak hanya itu, kurangnya kepercayaan juga dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hasil pembangunan. Sebagai contoh, fasilitas umum yang telah dibangun menjadi kurang terawat karena masyarakat merasa tidak memiliki rasa tanggung jawab

¹⁰ Latifah, L., Nunung, A., & Fatmawati. (2026). Partisipasi publik dalam formulasi kebijakan: Strategi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 8(2), 181–190.

¹¹ Rita Dewi Wahyunengseh. (2011). Membangun kepercayaan publik melalui kebijakan sosial inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1).

terhadap fasilitas tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran, penerapan sistem akuntabilitas yang jelas, serta penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi. Selain itu, pemerintah juga perlu melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan agar tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

- c. Dari segi sosial dan moral, korupsi juga membawa dampak yang sangat serius. Nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas dalam masyarakat menjadi semakin menurun. Jika praktik korupsi terus terjadi dan tidak ditindak secara tegas, maka akan muncul anggapan di masyarakat bahwa korupsi adalah hal yang biasa atau bahkan dapat dimaklumi.¹² Kondisi ini sangat berbahaya, terutama bagi generasi muda, karena dapat membentuk pola pikir yang salah dan menormalisasi perilaku tidak jujur sejak dini.
- d. Selain itu, pendidikan anti korupsi juga memiliki peran yang sangat penting. Penanaman nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas perlu dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan formal di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. Mahasiswa sebagai generasi muda juga memiliki peran strategis sebagai agen perubahan, yaitu dengan menyebarkan kesadaran anti korupsi, menjadi contoh perilaku jujur, serta aktif dalam kegiatan sosial yang mendukung transparansi dan keadilan.
- e. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah sosial dan moral yang memerlukan penanganan secara

¹² B. Hartono dan Z. Hasan, "Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung,

menyeluruh. Upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tercipta kehidupan sosial yang adil, sejahtera, dan berintegritas.

2. Faktor penyebab korupsi

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan responden, dapat diketahui bahwa faktor penyebab korupsi tidak hanya berasal dari satu aspek saja, melainkan merupakan gabungan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, moral atau integritas individu, adanya kesempatan, serta lemahnya sistem hukum yang berlaku.

- a. Dari segi ekonomi, beberapa responden menyatakan bahwa tekanan kebutuhan hidup dan keinginan untuk memenuhi gaya hidup yang tinggi dapat menjadi pemicu seseorang melakukan korupsi. Ketika pendapatan yang dimiliki dianggap tidak mencukupi, sementara kebutuhan atau keinginan semakin meningkat, maka individu cenderung mencari jalan pintas, salah satunya melalui tindakan korupsi.¹³ Namun, faktor ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab, karena pada kenyataannya banyak pelaku korupsi yang berasal dari kalangan ekonomi yang sudah mapan.
- b. Faktor moral dan integritas juga menjadi penyebab utama terjadinya korupsi. Rendahnya nilai kejujuran, tanggung jawab, dan rasa amanah dalam diri individu membuat seseorang lebih mudah tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan yang dimilikinya. Kurangnya pendidikan karakter dan lemahnya penanaman nilai-nilai etika sejak dini turut memperparah kondisi ini. Dalam hal ini, korupsi bukan hanya disebabkan oleh kebutuhan, tetapi juga oleh sikap serakah dan kurangnya kontrol diri¹⁴. Selain itu, adanya kesempatan juga menjadi

¹³ Sari, D. P., & Nugroho, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 120–135.

¹⁴ Z. Hasan, B.S. Wijaya, A. Yansah, R. Setiawan, dan A.D. Yuda, “Strategi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Integritas dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa,” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 241–255.

faktor penting yang mendorong terjadinya korupsi. Kesempatan ini biasanya muncul akibat lemahnya sistem pengawasan, kurangnya transparansi, serta adanya celah dalam sistem administrasi dan birokrasi. Ketika seseorang memiliki akses terhadap kekuasaan atau pengelolaan dana tanpa pengawasan yang ketat, maka peluang untuk melakukan korupsi menjadi semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang tidak baik dapat membuka ruang bagi terjadinya penyimpangan.

- c. Faktor lainnya adalah lemahnya penegakan hukum. Beberapa responden menyampaikan bahwa hukuman terhadap pelaku korupsi yang dianggap kurang tegas dan tidak memberikan efek jera menjadi salah satu penyebab masih maraknya kasus korupsi. Selain itu, adanya praktik ketidakadilan dalam penegakan hukum, seperti perlakuan yang berbeda terhadap pelaku tertentu, juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat luas dalam kehidupan sosial dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi korupsi memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun mahasiswa. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan (*agent of change*) yang dapat menyebarkan kesadaran, mengedukasi masyarakat, serta menjadi contoh dalam menerapkan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Dengan adanya peran aktif mahasiswa, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih bersih dari praktik korupsi dan menuju masyarakat yang adil serta berintegritas tinggi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan fenomena multidimensional yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat. Dampak tersebut tidak hanya terbatas pada aspek

ekonomi, tetapi juga meluas pada penurunan kualitas moral, melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi, serta terganggunya struktur sosial dan efektivitas pembangunan.

Secara konseptual, mahasiswa memandang korupsi sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai fundamental seperti keadilan, integritas, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Perspektif ini menunjukkan kecenderungan normatif dan idealis yang berorientasi pada kerangka teoritis. Sementara itu, masyarakat umum cenderung memiliki perspektif empiris dan pragmatis, yang didasarkan pada pengalaman langsung terhadap dampak korupsi, seperti meningkatnya ketimpangan sosial, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta menurunnya tingkat kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, A. A., Jania, C., & Andrian, S. D. (2024). Dampak korupsi terhadap perekonomian dan kehidupan sosial. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2).
- Stephen D. Morris & Joseph L. Klesner, "Corruption and Trust," *Comparative Political Studies* 43, no. 10 (2010): 1258-1285.
- Raisyah, R., Ningrum, Z. A., & Adila, A. (2024). Peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Cendekia Hukum Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.71417/jchi.v1i2.34>
- Wibowo, A., & Puspitasari, D. (2021). Peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 112-120.
- Sari, N. P. (2020). Pendidikan antikorupsi sebagai upaya pembentukan karakter mahasiswa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 5(1), 45-53.
- A'yun, S. Q., Habsy, B. A., & Nursalim, M. (2025). Model-model penelitian kualitatif: Literature review. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(2), 341-354.
- Z. Hasan, "Implikasi Pengembalian Keuangan Negara terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan," *Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- Dwiyanto, A. (2015). *Manajemen pelayanan publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Setiawan, A. (2017). Kepercayaan publik terhadap pemerintah dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1), 45-58.
- Latifah, L., Nunung, A., & Fatmawati. (2026). Partisipasi publik dalam formulasi kebijakan: Strategi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan*, 8(2), 181-190.
- Rita Dewi Wahyunengseh. (2011). Membangun kepercayaan publik melalui kebijakan sosial inklusif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(1).
- Z. Hasan, "Implikasi Pengembalian Keuangan Negara terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri Pedesaan," *Keadilan Progresif*, Vol. 9, No. 2, 2018.
- B. Hartono dan Z. Hasan, "Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) yang Dilakukan oleh Oknum Mantan Kepala Kampung,
- Hasan, Z. (n.d.). Pendidikan anti korupsi: Integrasi pencegahan tindak pidana korupsi di era 4.0.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(2), 120-135.
- Z. Hasan, B.S. Wijaya, A. Yansah, R. Setiawan, dan A.D. Yuda, "Strategi dan Tantangan Pendidikan Anti Korupsi dalam Membangun Integritas dan Pembentukan Karakter Generasi Penerus Bangsa," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 241-255.
- Hasan, Z., Rusli, T., & Sanida, N. (n.d.). Pendidikan anti korupsi: Eksplorasi model pembelajaran anti korupsi yang berkearifan lokal
- W. Saputri dan Z. Hasan, "Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini di Lembaga Pendidikan," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 5475-5484.